

BAB I

PENDAHULUAN

A. Arti Penting

Saya tertarik mengangkat topik dengan judul diatas dikarenakan isu lingkungan hidup saat ini menjadi topik yang hangat untuk dibicarakan terutama mengenai polusi udara. Polusi udara (*Haze pollution*) yang terjadi di Tiongkok beberapa tahun terakhir telah mencapai batas berbahaya untuk dirasakan oleh manusia. Pemerintah Tiongkok dalam menghadapi polusi udara tersebut telah melakukan penanganan pertama dengan mengeluarkan peringatan merah untuk masyarakat Tiongkok. Hal tersebut merupakan dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan multinasional (MNC) yang mengeluarkan limbah dengan seenaknya. MNC pun saat ini menjadi salah satu aktor internasional yang sangat berperan di beberapa negara berkembang. Tiongkok sendiri telah membuka pintu investasi asing terbuka sejak masa kepemimpinan Deng Xiaoping.

Dengan dibukanya pintu investasi asing, banyak investor asing maupun lokal yang menanamkan modalnya di Tiongkok. Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir mulai melihat perkembangannya untuk menjadi negara *super power*. Peningkatan tersebut tidak luput dari keuntungan masuknya perusahaan asing maupun lokal di negara tersebut. Akan tetapi, saya menduga kebijakan antara perusahaan multinasional dengan pemerintah Tiongkok sendiri kurang adanya ketegasan. Sehingga, Tiongkok harus mengalami dan menangani dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan multinasional yang sangat merugikan negaranya. Untuk itu, karya ilmiah ini bertujuan untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai dampak yang timbul akibat dari merebaknya MNC di Tiongkok.

B. Latar Belakang Masalah

Globalisasi merupakan proses interaksi dan integrasi antar masyarakat, perusahaan, dan pemerintah dari negara-

negara berbeda. Proses globalisasi dikendalikan terutama oleh perdagangan internasional dan kegiatan investasi oleh korporasi serta ditopang oleh kehadiran teknologi informasi. Globalisasi memiliki dampak baik dan dampak buruk seperti lingkungan, kebudayaan, sistem politik, dan lain sebagainya. Fenomena ini memegang peran penting dalam masalah lingkungan dikarenakan globalisasi menggerakkan kegiatan-kegiatan yang merusak alam atau lingkungan di berbagai wilayah dan negara. Hal tersebut juga berakibat pada bertambahnya konsumsi sampah dengan volume yang semakin meningkat. Isu lingkungan hidup menjadi ramai diperbincangkan di kalangan masyarakat pada era globalisasi ini. Tidak hanya menjadi isu domestik disalah satu negara saja tetapi juga menjadi isu yang dialami oleh berbagai negara, seperti halnya masalah *haze pollution*. Permasalahan *haze pollution* tidak hanya dihadapi oleh satu negara saja tetapi isu tersebut telah menjadi permasalahan global.

BHP Billiton merupakan perusahaan pertambangan yang berpusat di Melbourne, Australia (BHP Billiton). Perusahaan ini terbentuk dari penggabungan antara BHP (Broken Hill Proprietary) dan Billiton yang dimana dua perusahaan tersebut tergolong dalam perusahaan kecil (BHP Billiton). Perusahaan tersebut didirikan pada pertengahan tahun 1800-an. Tahun 2001, *Australian Broken Hill Proprietary Company Limited* (BHP) dan *The Anglo-Dutch Billiton plc* melakukan penggabungan perusahaan (*merger*) sehingga membentuk BHP Billiton (BHP Billiton). Perusahaan pertambangan BHP Billiton merupakan salah satu perusahaan sumber daya terkemuka di dunia. Perusahaan ini selain memproduksi batubara juga memproduksi besi, intan, minyak bumi, bauksit, tembaga, nikel, uranium, dan perak.

Selain memiliki kantor pusat di Melbourne, Australia, perusahaan ini juga memiliki kantor di beberapa negara seperti di Houston, Amerika Serikat, Santiago, Perth, Brisbane, Kuala Lumpur, Singapore, dan Shanghai. Pencarian nama China baru dimulai pada bulan Oktober 2001 untuk membangun BHP Billiton sebagai kehadiran baru dan has di sektor sumber

daya Tiongkok dan meningkatkan citra dan reputasi perusahaan di Tiongkok (BHP Billiton, 2002). Pada Desember 2001, BHP Billiton mendaftarkan nama baru yaitu *Bi He Bi Tuo* dan wilayah lainnya yang relevan (BHP Billiton, 2002).

Krisis iklim yang terjadi di berbagai negara saat ini telah menjadi topik hangat untuk diangkat ke panel diskusi. Berbagai penelitian dari para ahli ataupun akademik telah banyak dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab fenomena tersebut. Para ilmuwan yang berada di Observatorium Mauna Loa di pulau besar Hawaii mengumumkan bahwa emisi CO₂ global telah melewati ambang batas di 400 bagian per juta (ppm) (Dreams, 2013). Sekitar tahun 1960, tingkat kadar CO₂ di atmosfer tumbuh sebesar 0,7 ppm per tahun (Dreams, 2013). Akan tetapi, beberapa tahun terakhir ini tingkat kadar CO₂ di atmosfer meningkat tiga kali lipat menjadi 2,1 ppm per tahun (Dreams, 2013). Hal tersebut dikarenakan Tiongkok telah melakukan pembangunan industri besar-besaran guna memajukan negaranya.

Ahli geografi Richard Heede melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa hampir dua per tiga emisi karbon antropogenik hanya berasal dari 90 perusahaan dan industri yang dikelola oleh pemerintah (Starr, 2016). Ke-90 perusahaan tersebut termasuk 50 perusahaan milik investor terutama perusahaan minyak dan produsen batubara (Dreams, 2013). Salah satu perusahaan produsen batubara tersebut adalah BHP Billiton.

Emisi gas kumulatif yang dihasilkan oleh BHP Billiton pada tahun 1751-2010 diperkirakan mencapai 7.606 MtCO_{2e}, yang dimana hasil tersebut mewakili 0,52% emisi industri global (Heede, 2014). Menurut manajemen BHP Billiton 10% dari emisi ini berasal dari operasi langsung, sementara 90% berasal dari produk yang dijual oleh perusahaan (Hannam, 2013).

Haze pollution yang terjadi di Tiongkok telah menjadi masalah utama dan merupakan paradox bagi industri di Tiongkok. Sejak tahun 1978, lingkungan Tiongkok telah

memburuk secara signifikan (Johnson, Liu, & Newfarmer, 1997). Urbanisasi dan industrialisasi yang cepat telah menghasilkan sejumlah besar polusi udara dan air, serta menurunkan kualitas udara dan air (Johnson, Liu, & Newfarmer, 1997). Populasi perkotaan Tiongkok melonjak, sehingga membuat masyarakat Tiongkok berada lebih dekat dengan cerobong asap industri dan emisi residensial serta meningkatkan jumlah orang yang terpapar polusi udara dan air perkotaan (Johnson, Liu, & Newfarmer, 1997).

Meningkatnya kadar emisi gas CO₂ yang terjadi di Tiongkok membuat pemerintah Beijing mengeluarkan peringatan merah atas kondisi tersebut (Embun, 2016). Peringatan merah merupakan peringatan dengan level tertinggi dalam sistem peringatan 4 tingkat di Tiongkok (Indonesia, 2015). Kementerian Perlindungan Lingkungan Tiongkok, melaporkan setidaknya ada 21 kota yang berada di Tiongkok seperti Tianjin, Shijiazhuang, Taiyuan, dan Zhengzhou yang juga dinyatakan masuk ke dalam zona merah polusi (Embun, 2016). Menurut laporan *World Research Institute* pada tahun 1999 yang berjudul “*Urban Air Pollution Risk to Children: A Global Environmental Health Indicator*”, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa 9 dari 10 kota di dunia yang memiliki polusi udara terburuk berada di Tiongkok (Urban Air Pollution Risk to Children: A Global Environmental Health Indicator, 1999).

Polusi udara disebabkan oleh beberapa faktor, salah satu faktor polusi udara luar terutama disebabkan oleh pembakaran produk minyak bumi atau batubara oleh kendaraan bermotor, industri, dan pembangkit listrik (Kjellstrom, Lodh, McMichael, Ranmuthugala, Shrestha, & Kingsland, 2006). Polusi udara perkotaan dan paparan timbal adalah dua dari bahaya lingkungan (World Health Report 2002, 2002) dinilai sebagai bagian dari perhitungan beban penyakitnya untuk *Laporan Kesehatan Dunia 2002* (Kjellstrom, Lodh, McMichael, Ranmuthugala, Shrestha, & Kingsland, 2006). Beban penyakit ini terjadi terutama di negara-negara berkembang yang dimana Tiongkok dan India berkontribusi

paling besar terhadap beban global (Kjellstrom, Lodh, McMichael, Ranmuthugala, Shrestha, & Kingsland, 2006).

Dengan tingginya kadar emisi karbon di dunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim PBB bertajuk *United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) Conference of The Parties ke-21 (COP21)* yang diadakan di Paris, Perancis pada November 2015 memunculkan berbagai pernyataan soal sejauh mana negara-negara di dunia mengupayakan perubahan iklim global (Sari, 2015).

Pada tanggal 30 November sampai dengan 13 Desember 2015, COP 21 telah dilangsungkan di Paris yang dimana hasil dari pertemuan tersebut adalah disepakatinya sebuah kesepakatan yang mengikat semua negara anggota yang terlibat dalam pertemuan tersebut. COP (Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Kesepakatan ini memiliki tujuan untuk menurunkan bahkan menghentikan suhu pemanasan bumi hingga kurang dari 2° Celcius (Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Sebanyak 195 negara telah mendukung hasil dari kesepakatan ini termasuk Amerika Serikat dan Tiongkok yang dimana kedua negara tersebut merupakan negara penyumbang emisi gas karbon terbesar (Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan).

Sementara itu, dalam Protokol Kyoto 1997, Tiongkok tidak terikat dalam usaha mengurangi emisi gas karbon dikarenakan pada kesepakatan ini dibuat Tiongkok masih dipandang sebagai negara berkembang ketika (Sari, 2015). Sejalan dengan meningkatnya ekonomi Tiongkok, negara ini menjadi negara penghasil gas rumah kaca terbesar. Meski demikian, Tiongkok sejak 30 Juni 2015 menunjukkan keseriusannya dengan merencanakan memberantas dan mengurangi permasalahan perubahan iklim yang diserahkan kepada UNFCCC (Sari, 2015). Rencana tersebut tercantum dalam *Intended Nationally Determined*

Contributions (INDC), yang dimana Tiongkok menyatakan bahwa mereka akan berusaha menekan emisi gas karbon secara domestik sebesar 60% hingga 65% dari tingkat pada tahun 2005 (Sari, 2015). Selain daripada itu, Tiongkok juga menyatakan bahwa mereka akan menggunakan energi non-fosil hingga meningkat 20% sampai dengan tahun 2030. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mengusahakan pengadaan energi bersih sebagai salah satu sumber energi yang utama.

Dalam dokumen kesepakatan yang diberikan kepada PBB, Tiongkok menyatakan bahwa dalam menjalankan kesepakatan tersebut PBB harus memperitungkan tanggung jawab yang berbeda dalam setiap negara (Sari, 2015). Hal tersebut dikarenakan Tiongkok menganggap negara-negara maju lebih banyak menyumbang emisi gas karbon daripada negara berkembang pada saat ratifikasi Protokol Kyoto (Sari, 2015). Dengan keinginan teguh yang ditunjukan Tiongkok tersebut, Amerika Serikat pada saat ini merupakan negara maju yang hanya menentang Protokol Kyoto.

C. Rumusan Masalah

“Bagaimana pengaruh kerjasama antara BHP Billiton dengan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok terhadap penurunan emisi gas karbon?”

D. Teori

Karya ilmiah ini menggunakan teori *Structural Adjustments*, konsep *Green Politics*, konsep *Externalities* dan pendekatan *General System Analysis* untuk menjawab pertanyaan tersebut.

1. Teori Structural Adjustments

Menurut Abouharb dan Cingranelli, “*Structural Adjustments* adalah perubahan kebijakan yang diterapkan oleh *International Monetary Fund* (IMF) dan Bank Dunia (*Bretton Woods Institutions*) di negara-negara berkembang” (M. Rodwan Abouharb, 2007, p. 54). Perubahan kebijakan ini adalah kondisi

(persyaratan) untuk mendapatkan pinjaman baru dari IMF atau World Bank, atau untuk memperoleh suku bunga yang lebih rendah atas pinjaman yang ada. Persyaratan diterapkan untuk memastikan bahwa uang yang dipinjamkan akan digunakan sesuai dengan tujuan dari keseluruhan pinjaman.

Structural Adjustments akan tercipta dengan baik jika kebijakan pemerintah menciptakan lingkungan yang kondusif melalui promosi stabilitas ekonomi makro dan pertumbuhan. Stabilitas ekonomi makro memberikan kontribusi ekonomi yang dinamis, yang pada gilirannya mungkin untuk membuat penyesuaian lebih mudah dan lebih cepat. Ketidakseimbangan ekonomi makro, seperti inflasi yang berlebihan dan defisit anggaran yang tinggi yang di miliki di masa lalu disebabkan pada pertumbuhan ekonomi biaya rendah. Untuk negaranegara berkembang, mengamankan stabilitas ekonomi makro melalui kebijakan fiskal dan moneter, menghapus suatu bias anti-ekspor dan mengadopsi kebijakan nilai tukar yang tepat memainkan peran kunci.

Secara khusus, peraturan efisien yang dapat mencapai tujuan lain, terus membebani peraturan pada perusahaan untuk jumlah minimum yang diperlukan, memupuk persaingan dan menjamin keterbukaan pasar asli akan memungkinkan perusahaan untuk terlibat secara efektif dalam proses *Structural Adjustments*, baik melalui transformasi yang terjadi dalam industri atau melalui masuk dan keluar lintas sektor. Studi kasus yang menitikberatkan pentingnya lingkungan seperti kasus pada makalah ini. Pada kasus ini, pemerintah harus dapat mengikuti aturan yang diberikan oleh perusahaan yang dimana aturan tersebut memberikan dampak yang positif bagi Tiongkok. Selain dengan meningkatnya perekonomian Tiongkok, lingkungan hidup di Tiongkok juga mengalami peningkatan mutu. Hal tersebut dapat dilihat dengan menurunnya emisi gas

karbon Tiongkok yang dimana penurunan tersebut hasil dari kerjasama antara pemerintah Tiongkok dengan perusahaan pertambangan BHP Billiton. Pada tingkatan yang lebih luas, *Structural Adjustments* melakukannya dengan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan dengan demikian membantu menciptakan lingkungan dimana pergerakan faktor produksi dari menurun memperluas wilayah kegiatan yang difasilitasi. Sejauh pertumbuhan melalui perdagangan membantu proses penyesuaian di negara berkembang dan berkontribusi terhadap peningkatan kembali ke tenaga kerja di negara-negara.

2. Konsep Green Politics

Adanya krisis lingkungan yang marak terjadi menjadikan konsep *Green Politics* menjadikan isu tersebut menjadi objek yang perlu dikaji dan diuji. Selain itu, konsep ini muncul akibat dari adanya pengetahuan dan kewaspadaan manusia akan pentingnya lingkungan dan adanya hubungan antara manusia dan alam yang perlu diperhatikan.

Menurut analisa dari Jackson dan Sorensen pada tahun 2005, “topik tentang lingkungan hidup memang menjadi semakin sering muncul dalam agenda internasional lebih dari tiga dekade terakhir. Sedangkan, jumlah masyarakat seiring waktu pun semakin meningkat. Populasi global yang meningkat dengan cepat untuk mengejar standar kehidupan yang lebih tinggi merupakan ancaman potensial terhadap lingkungan hidup” (Jackson, 2005).

Isu-isu kosmopolitan yang diangkat oleh perspektif alternatif seperti konsep *Green Politics* ini merupakan sebuah hal yang melanggar kedaulatan yang tidak pernah diperhatikan oleh pandangan tradisional (Green Politics). Menurut Burchill dan Linklater, yang menjadi tujuan utama dari konsep *Green Politics* adalah memberikan pemaparan mengenai krisis ekologi yang dialami oleh manusia dan memberikan manusia

mengenai dasar normatif guna menghadapi krisis tersebut.

Konsep ini juga berfokus kepada menciptakan sebuah keadilan yang dimana negara maju telah merugikan negara berkembang akibat ketidakadilan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan berbagai negara maju kerap memanfaatkan negara berkembang dengan mengeksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) sehingga menimbulkan berbagai kerusakan lingkungan yang terdapat di negara berkembang (Burchill, 1996). *Green Politics* menyatakan bahwa berbagai masalah lingkungan yang ditimbulkan oleh para *state-actor* akan selalu tercampuri dengan permainan politik dan para *state-actor* tetap melakukan eksplorasi lingkungan yang ada di negara tersebut.

Menurut Robert Jackson, **“lingkungan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang dimana memiliki nilai tertinggi”**. Akan tetapi, kebutuhan manusia yang cenderung tidak akan pernah ada habisnya membuat lingkungan tidak memiliki nilai sama sekali dimata kaum elit maupun pengusaha.

Contohnya adalah permintaan akan batu bara di Tiongkok sangat tinggi, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan perindustrian di negara tersebut tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan akan batu bara negara-negara lain. Hal tersebut mengakibatkan para pengusaha tambang batu bara menjadi gelap mata dengan membiarkan bisnis tersebut lebih mengeksploitasi tambang tersebut. Tujuan dari tindakan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan yang besar mengingat permintaan akan batu bara semakin meningkat pula. Dampak dari tindakan tersebut tidak lain adalah semakin tercemarnya lingkungan yang berada disekitar tambang tersebut dan juga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah.

3. Konsep Externalities

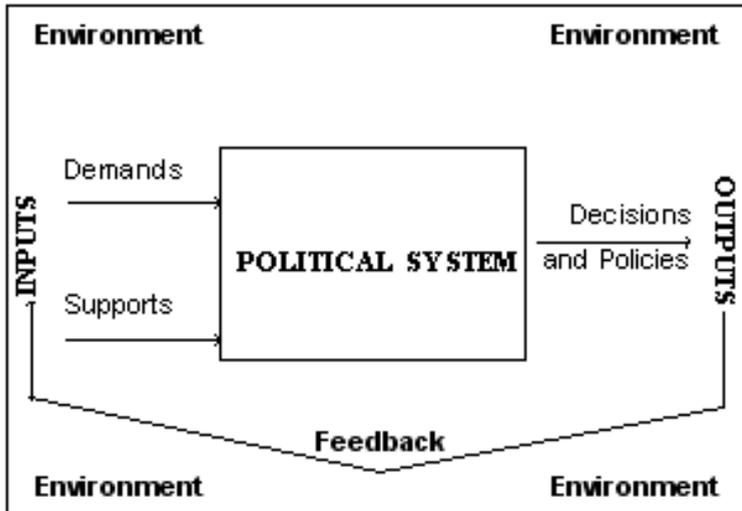
Externalities menurut James Buchanan dan Wm. Craig Stubblebine adalah “biaya yang harus ditanggung atau dimanfaatkan secara tidak langsung yang diberikan dari suatu pihak akibat aktivitas ekonomi” (Buchanan, 1962). *Externalitas* terjadi ketika harga pasar tidak sesuai dengan semestinya. Contohnya adalah munculnya limbah oleh perusahaan dalam memproduksi suatu barang yang dapat merugikan masyarakat. Limbah tersebut dapat dikatakan sebagai biaya tambahan yang harus ditanggung oleh masyarakat sekitar selain dari biaya membeli barang dari perusahaan tersebut. Limbah seharusnya merupakan tanggung jawab dari perusahaan yang mengeluarkannya. Akan tetapi, pada kenyataannya masyarakatlah yang harus menanggung permasalahan tersebut.

Pada umumnya, harga barang yang di pasar belum mencakup biaya sosial yang timbul akibat dari limbah yang dikeluarkan. Apabila biaya sosial dimasukkan kedalam harga pasar, maka harga barang tersebut akan mengalami kenaikan harga dari harga barang sebelumnya. *Externalitas* merupakan bukti bahwa pasar ideal yang kita inginkan tidak sepenuhnya terwujud (Siagian, 2011).

4. Pendekatan General System Analysis

David Easton dalam *A System Analysis of Political Life*, menyatakan bahwa “sistem politik adalah keseluruhan dari interaksi-interaksi yang mengatur pembagian nilai-nilai secara *autoritatif* (berdasarkan wewenang) untuk dan atas nama masyarakat (a political system can be designated as those interactions through which value are authoritatively allocated for a society)” (Easton, *A System Analysis of Political Life*, 1965).

Gambar 1.1 (Gambar tentang pendekatan General System Analysis)



Sumber : (Easton, A Systems Analysis of Political Life, 1965).

E. Hipotesa

Dalam rumusan masalah diatas, penulis mengambil hipotesa sebagai berikut:

“Pengaruh kerjasama antara pemerintah Republik Rakyat Tiongkok dan perusahaan multinasional BHP Billiton adalah dengan menurunnya tingkat kadar emisi gas karbon di Tiongkok. Hal tersebut dikarenakan perusahaan pertambangan BHP Billiton merupakan perusahaan yang peduli terhadap lingkungan hidup.”

F. Metode Riset

1. Jenis Penelitian

Penulis dalam karya tulis ini menggunakan penelitian yang bersifat eksplanasi, dimana penelitian ini berusaha menjelaskan faktor penyebab dari suatu

fenomena. Unit Analisa dari karya tulis ini adalah perusahaan pertambangan BHP Billiton dan Unit Eksplanasi dari karya tulis ini adalah lingkungan hidup. Karya tulis ini dapat dikatakan sebagai induksionis yaitu unit eksplanasi memiliki level yang lebih tinggi dari level yang dimiliki unit analisa. Hal tersebut dikarenakan perusahaan pertambangan BHP Billiton menempati level kelompok individu (level 2), sedangkan lingkungan hidup menempati level group atau sistem internasional (level 5).

2. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan model *Content Analysis* dan *Existing Statistic Analysis*. *Content Analysis* merupakan model analisis yang menggunakan dokumen, isi pidato, dan lain-lain untuk mengkaji dan menganalisa suatu fenomena. Sedangkan, *Existing Statistic Analysis* merupakan model analisis yang menggunakan grafik, tabel, ataupun statistik untuk mengkaji dan menganalisa suatu fenomena.

G. Sistematika Penulisan

Dalam karya tulis ini, penulis membagi penelitian menjadi 5 bab yang berupa:

BAB I, memaparkan mengenai Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, dimana dalam latar belakang masalah ini menjelaskan tentang BHP Billiton yang masuk kedalam 20 daftar perusahaan yang menyumbang emisi gas karbon terbesar di dunia dan juga menjelaskan Tiongkok yang juga termasuk sebagai salah satu negara yang menyumbang emisi gas karbon tertinggi di dunia. Selain latar belakang masalah, dalam bab I ini juga menyertakan Tujuan Penelitian, Rumusan Masalah, Kerangka Pemikiran (Teori dan Konsep), Hipotesa, Metode Riset, dan Sistematika Penulisan.

BAB II, penulis menjelaskan mengenai kebutuhan sumber energi di Tiongkok, permasalahan yang memunculkan dampak terhadap lingkungan hidup di Tiongkok, serta

masuknya *Multinational Corporations* (MNC) untuk pemenuhan energi Tiongkok.

BAB III, penulis menjelaskan mengenai Profil dari perusahaan pertambangan BHP Billiton, bidang gerak perusahaan pertambangan BHP Billiton, dan kebijakan lingkungan hidup BHP Billiton.

BAB IV, penulis memaparkan mengenai penegakan hukum global tentang lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan hidup Tiongkok, serta menjelaskan penurunan emisi gas karbon pasca kerjasama antara pemerintah Tiongkok dengan BHP Billiton.

BAB V, memaparkan Kesimpulan Penelitian dan Saran.